

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BURUNG WALET HABITAT ALAMI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROPINSI SUMATERA SELATAN**



Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan

Nurul Hidayati
21080110400018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BURUNG WALET HABITAT ALAMI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh

Nurul Hidayati
21080110400018

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Boedi Hendarto, M.Sc

Dra. Kismartini, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BURUNG WALET HABITAT ALAMI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh

Nurul Hidayati
21080110400018

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 19 September 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tanda tangan

Ketua

Dr. Boedi Hendarto, M.Sc

.....

Anggota

1. Dra. Kismartini, M.Si

.....

2. Ir. Sutarno, MS

.....

3. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si

.....

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, September 2011

Nurul Hidayati

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Purworejo pada tanggal 10 Desember 1974, sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara dari Bapak H. Djarno dan Ibu Hj. Saparinten. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Aglik I dan selesai pada tahun 1987. Pendidikan menengah ditempuh di SMPN 2 Grabag dan SMAN 1 Purworejo yang berturut-turut diselesaikan pada tahun 1990 dan 1993.

Gelar kesarjanaan strata 1 Kehutanan diraih pada tahun 1998 pada Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sejak tahun 1999 hingga 2001, Penulis bekerja di Departemen Kehutanan dengan status dipekerjakan pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, sebagai calon penyuluh kehutanan. Sejak tahun 2001 hingga sekarang Penulis bekerja pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program.

Penulis telah menikah dengan Muri Tajam , A.Md pada tahun 2001 dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Taqiyuddin Akram, Saifuddin Rabbani dan Jihan Farha Imani.

Penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang dengan mendapat dukungan beasiswa *co-sharing* antara Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas) dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penulis

KATA PENGANTAR

Pujian terbaik dan syukur hanyalah untuk Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Tesis ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan” , disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Boedi Hendarto, MSc sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan serta pencerahan intelektual selama proses penyusunan Tesis ini.
2. Dra. Kismartini, MSi sebagai Dosen Pembimbing II atas segala dorongan, saran dan pencerahan intelektual selama proses penyusunan Tesis ini.
3. Ir. Sutarno, MS dan Dra. Retno Sunu Astuti, MSi yang telah bersedia menguji dan memberikan saran perbaikan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro beserta seluruh staf pengajar.
5. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas) atas kesempatan belajar dan beasiswa yang diberikan.
6. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah memberikan izin belajar serta beasiswa.
7. Kedua orang tua dengan keikhlasan dan kasih sayangnya telah membantu mengasuh anak-anak Penulis selama ditinggal studi.

8. Mbak Tatik dan Mas Darwo sekeluarga di Semarang atas segala fasilitas yang diberikan selama Penulis tinggal di Semarang.
9. Keluarga tercinta, suami dan anak-anak (Taqi, Saif dan Hani) yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan kelapangan bagi Penulis.
10. Segenap pengelola Program Studi Magister Ilmu Lingkungan UNDIP atas bantuan dan fasilitas yang disediakan, khususnya kepada Mas Hastomo, Mas Doni, Mbak Fitri, Mbak Aisyah, Sulis dan Adi.
11. Segenap rekan perjuangan MIL 27 atas kebersamaannya
12. Seluruh narasumber dalam penelitian ini terutama teman-teman di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU
13. Seluruh pihak yang telah membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan Pembaca serta semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pendekatan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Keaslian Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Gambaran tentang Burung Walet.....	9
2.2. Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet	12
2.3. Implementasi Kebijakan	15

	Halaman
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian.....	26
3.3. Fenomena yang Diteliti	26
3.4. Lokasi Penelitian.....	27
3.5. Pemilihan Informan.....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Analisis Data	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten OKU	31
4.1.1. Kondisi Biofisik	31
4.1.2. Kependudukan.....	37
4.1.3 . Kondisi Gua Walet di Kabupaten Ogan Komering Ulu	37
4.2. Implementasi Perda Kabupaten OKU Nomor 15 tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet	39
4.2.1. Tujuan Kebijakan	39
4.2.2. Aktor /Implementor.....	40
4.2.3. Kegiatan/Aktifitas untuk Mencapai Tujuan	41
4.2.4. Hasil yang Dicapai	55
4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi	59
4.3.1. Komunikasi	59
4.3.2. Sumberdaya.....	61
4.3.2.1. Sumberdaya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan.....	61
4.3.2.2. Sumberdaya yang Dimiliki Pengusaha/ Pemegang IPBW	66

	Halaman
4.3.3. Disposisi/Sikap.....	69
4.3.3.1. Sikap Petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap Isi Perda Nomor 15 tahun 2007.....	69
4.3.3.2. Sikap Pengusaha/Pemegang IPBW dan Masyarakat terhadap Isi Perda Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007	70
4.4. Pembahasan.....	72
 V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran praktis.....	82
5.3. Saran akademis.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian-penelitian yang mengkaji/berkaitan dengan Burung Walet Habitat Alami	7
2. Aplikasi konseptual Model Edwards III perspektif implementasi kebijakan	23
3. Luas hutan Kabupaten OKU berdasarkan fungsinya	32
4. Luas hutan menurut fungsinya dan penyebarannya di wilayah Kabupaten OKU	33
5. Penggunaan lahan di Kabupaten OKU	34
6. Data kepadatan penduduk di Kabupaten OKU	36
7. Gua Walet yang terdapat di Kecamatan Semidang Aji.....	37
8. Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan burung walet habitat alami	42
9. Sistem pengelolaan gua walet di Kabupaten OKU	46
10. Pendapatan pemegang IPBW selama delapan kali pemanenan	47
11. Kewajiban pembayaran yang ditunaikan oleh pemegang IPBW	58
12. Komposisi pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU menurut pendidikan formal	62
13. Anggaran untuk kegiatan pengelolaan burung walet pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU Tahun 2008-2010	65
14. Personalia yang dimiliki oleh pemegang IPBW	67
15. Biaya yang dikeluarkan pemegang IPBW selama 2 (dua) Tahun.....	67
16. Jenis peralatan dan perlengkapan yang dimiliki pemegang IPBW	68
17. Aplikasi Terapan Model Implementasi Edwards III dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami di Kab. OKU	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Dimensi Waktu <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Kebijakan.....	17
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III	22
3. Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi	24
4. Komponen-komponen Analisis Data : Model Alir	29
5. Mulut Gua Luguran di Desa Padang Bindu	38
6. Produksi Sarang Walet dari Gua Yemaye, Gua Batu Belah dan Gua Luguran Periode 2008-2010	56
7. Alur Komunikasi Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Lokasi Penelitian	88
2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten OKU	89
3. Ringkasan Hasil Wawancara.....	90
4. Foto-foto Kegiatan Penelitian	96
5. Perda Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007	99
6. Rekomendasi Penelitian	112

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten OKU telah menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan dan pengusahaan burung walet sebagai landasan untuk pengelolaan gua-gua walet secara lestari.

Penelitian ini ditujukan untuk *pertama* : mengkaji bagaimana implementasi Perda Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet khususnya burung walet habitat alami dalam kaitannya untuk keberlanjutan habitat dan populasi burung walet habitat alami, *kedua* : mengkaji faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi tersebut.

Fenomena-fenomena yang diamati dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan dari Edwards III yaitu implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Tujuan pertama implementasi yaitu perlindungan habitat dan pelestarian populasi burung walet telah tercapai. Tujuan kedua yaitu meningkatkan pendapatan daerah belum berhasil. Aspek sosial ekonomi masyarakat setempat belum sepenuhnya terakomodir dalam implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi adalah *pertama* : komunikasi antara Dinas Perkebunan & Kehutanan dan pengusaha sudah intensif dan tercapai pemahaman yang benar, *kedua* : sumberdaya; sumberdaya manusia dan anggaran untuk peralatan pada Dinas Perkebunan & Kehutanan belum memadai, sumberdaya manusia dan peralatan milik pengusaha sudah memadai; *ketiga* : disposisi; sudah ada komitmen dari pengusaha dalam melakukan panen lestari dan menunaikan kewajiban pembayaran. Petugas dari Disbunhut telah berswadaya dalam pengadaan peralatan sebagai respon terhadap ketiadaan anggaran pengadaan peralatan.

Kata kunci : implementasi kebijakan, pengelolaan, burung walet, habitat alami

ABSTRACT

OKU Regency Government has issued policies on the management and exploitation of swiftlets as the foundation for the sustainable management of swiftlet caves .

The aims of this research were : firstly, to examine the implementation of Regional Regulation of OKU Regency Number 15 of 2007 on managing and exploitation of swiftlets in the natural habitat, especially in relation to the sustainability of swiftlets habitats and populations in natural habitats, secondly, to examine the factors that contribute to the implementation process.

Phenomenas were observed in this study refers to the model of policy implementation of Edwards III model. Factors affecting the implementation were communication, resources and disposition.

The results showed the implementation has been carried out. The first goal of habitat protection and conservation of the swiftlet birds population has been attained. The second aim of increasing local revenues have not been successful yet Socio-economic aspects of the local community has not yet fully accommodated in policy implementation.

Factors that contributed to the implementation process were: firstly; communication, the communication between the Department of Plantation & Forestry and employer have intensified intensif and reached a correct understanding, secondly; resources, human resources and budget for equipment at the Department of Plantation & Forestry were inadequate. Human resources and equipment belonging to the employer were adequate . Officials from Department of Plantation & Forestry had self supporting in the procurement of equipment as a response to lack of equipment procurement budgets.

Key words: policy implementation, management, swiftlets , natural habitat

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara penghasil sarang burung walet terbesar di dunia, mencapai 75 % dari kebutuhan dunia (Tim Penulis Penebar Swadaya, 2010). Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor sarang burung walet dari Indonesia adalah Hongkong (Cina), Taiwan, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Belanda.

Masyarakat telah melakukan eksploitasi sarang burung walet berada di gua-gua alam pada berbagai kawasan di Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Harga sarang yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk memburunya. Berbagai cara telah dilakukan dalam memungut sarang dan tidak menutup kemungkinan dalam pemungutannya cenderung akan menurunkan populasi burung walet (Djuwantoko, 1998).

Burung walet belum dimasukkan ke dalam daftar Appendix II yaitu (jenis satwa yang diperkirakan mulai langka) yang perdagangannya harus melalui kuota dan diawasi secara seksama oleh *Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Akan tetapi dalam *Sidang Convention of the Parties (COP) IX* di Florida, USA pada bulan Nopember 1994 disepakati ada beberapa keputusan penting bagi perdagangan sarang burung walet (*Resolution on Conservation of Edible-nest Swiflets of Genus Collocalia*), yakni mendorong negara-negara terkait untuk menciptakan peraturan yang mengontrol panen sarang burung walet liar dalam kaitannya dengan hasil panen lestari, melalui program pengelolaan tertata, serta menemukan cara untuk meningkatkan partisipasi semua pihak yang bergerak dalam industri sarang burung dan program panen lestari. Pihak-pihak yang dimaksud adalah masyarakat lokal, pemanen/pengelola, pedagang maupun

pemerintah. Sidang tersebut juga merekomendasikan agar pengelolaan burung walet melibatkan pertimbangan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Pengelolaan burung walet juga ditujukan untuk menjamin bahwa konservasi burung walet dan pemanenan sarang dapat berkelanjutan.

Kelestarian habitat burung walet yang asli di gua-gua pada saat ini sudah mulai terancam (<http://m.suaramerdeka.com>). Faktor utama yang menyebabkan unduhan sarang burung walet turun drastis adalah penebangan hutan di sekitar gua yang menyebabkan jumlah pakan alami burung menjadi berkurang. Dampak lain penebangan pohon adalah mengakibatkan perubahan suhu udara di sekitar mulut gua, padahal burung walet hanya akan hidup jika habitatnya bersuhu dingin dan lembab (Zuhud, dkk, 1987). Menurut MacKinnon, dkk (2000), tekanan terhadap sumberdaya yang berharga ini terus meningkat karena penambahan penduduk, aksesibilitas ke gua yang semakin mudah dan perubahan tataguna lahan, sehingga perlu pengelolaan yang bijaksana serta mempertimbangkan biologi perkembangbiakan dan keperluan pakan bagi burung-burung walet tersebut.

Sejarah pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat ditelusuri semenjak mulai ditemukannya gua-gua yang dihuni oleh burung walet pada tahun 1950-an. Pada saat itu masyarakat mengambil sarang walet hanya saat membutuhkan saja yaitu untuk keperluan pengobatan. Di samping itu mereka juga belum mengetahui pasar sarang walet. Pengambilan sarang harus seizin tetua adat dan hanya diambil seperlunya saja. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 1980-an.

Pemanfaatan sarang walet mulai ditujukan untuk kepentingan komersial sejak tahun 1980 karena sudah ada pasar yang menampungnya. Pengelolaan masih menjadi wewenang adat/desa namun diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pengelolanya. Pada awal-awal pengelolaan, hasil setiap kali pemanenan bisa mencapai 150 kg sarang walet. Akan tetapi karena pola pemanenan dan teknik

pemanenan yang tidak mengindahkan azas kelestarian maka produksinya semakin menurun. Panen dilakukan saat sarang baru selesai terbentuk, sehingga pada tiap-tiap periode panen, hasil panen makin menurun. Alasan tidak adanya pengaturan pengendalian panen adalah karena kekuatiran akan pencurian terhadap sarang walet.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia spp*) di Habitat Alami (*In-Situ*) dan Habitat Buatan (*Ex-Situ*) telah mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengelola burung walet habitat alami maupun di luar habitat alami dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet. Pada masa itu pengelolaan burung walet habitat alami diserahkan kepada pihak ketiga. SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan tersebut adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU. Akan tetapi dalam pelaksanaannya timbul konflik dengan masyarakat karena pihak pengelola bukan penduduk setempat. Pada tahun 2004 akhirnya pengelolaan dikembalikan ke desa.

Adanya konflik pengelolaan serta untuk menyelaraskan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100//Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet. Pertimbangan lain yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pengusahaan burung walet dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Implementasi peraturan terbaru tersebut mulai dilaksanakan tahun 2008.

Kegiatan utama sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan burung walet habitat alami adalah ditetapkan pemegang Izin Pengelolaan Burung Walet (IPBW) Habitat Alami bagi Gua Yemaye, Gua Luguran

dan Gua Batu Belah melalui pelelangan karena pihak yang mengajukan permohonan lebih dari satu. Ali Usman selaku pemenang lelang pengelolaan gua tersebut mendapat hak untuk mengelola ketiga gua tersebut selama tiga tahun, dan berlaku mulai saat ditetapkan pada bulan Agustus 2008. Dalam kenyataannya pada tahun kedua, setelah melakukan delapan kali pemanenan, Ali Usman mengundurkan diri dan mengembalikan hak pengelolaan/IPBW tersebut kepada Pemerintah Kabupaten OKU dengan alasan merugi.

Pengelolaan gua walet melalui mekanisme pemberian IPBW kepada perorangan atau badan tertentu dipandang merupakan upaya privatisasi sumberdaya alam burung walet habitat alami oleh pemerintah daerah. Hal ini karena masyarakat sekitar gua walet tidak memiliki akses lagi terhadap keberadaan gua walet dan sarang burung walet tersebut. Ketentuan adanya pembayaran kontribusi kepada pemerintah daerah juga mengakibatkan penilaian bahwa hanya kalangan yang bermodal kuat yang bisa memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengelolaan gua walet. Fenomena ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam di wilayahnya.

1.2. Pendekatan Masalah

Permasalahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan antara sesuatu yang diharapkan atau yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan yang sedang berlangsung (*das sein*). Permasalahan juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang menantang untuk diperbaiki, disempurnakan dan ditingkatkan agar berdaya guna dan memberi manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di latar belakang, terdapat fenomena berupa pengunduran diri dari pengusaha/pemegang IPBW dalam hak pengelolaan gua walet pada tahun kedua. Menurut ketentuan dalam Perda Kabupaten OKU Nomor 15 tahun 2007, hak IPBW berlaku selama tiga tahun. Permasalahan lain adalah belum terakomodirnya hak masyarakat lokal terhadap keberadaan gua

walet. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang perlu dikaji bagaimana sebenarnya implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten OKU .

Faktor-faktor yang berperan atau mempengaruhi implementasi Perda Nomor 15 tahun 2007, penulis menduga bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya maupun sikap atau dukungan dari implementor.

Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur pengelolaan dan pengusahaan burung walet, baik di habitat alami (*in situ*) maupun di habitat buatan (*ex situ*). Dalam penelitian ini difokuskan terhadap implementasi pada pengelolaan dan pengusahaan burung walet di habitat alami (*in situ*)

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasar uraian pada latar belakang dan pendekatan masalah, maka implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten OKU perlu dikaji dengan pertanyaan sebagai berikut :

”Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 terhadap pengelolaan dan pengusahaan burung walet habitat alami beserta faktor-faktor yang berperan atas implementasi tersebut?”

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji bagaimana implementasi Perda Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet khususnya burung walet habitat alami tersebut dalam kaitannya untuk melindungi habitat dan populasi burung walet di habitat alami
2. Mengkaji faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi Perda Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet khususnya burung walet habitat alami.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian implementasi terhadap kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten OKU dalam hal ini adalah Perda Kabupaten OKU Nomor 15 Tahun 2007 adalah untuk mengetahui keadaan riil pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengusahaan burung walet habitat alami di Kabupaten OKU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan praktis bagi semua pihak, terutama penulis dan pemerintah Kabupaten OKU.

a. Pengembangan ilmu pengetahuan

Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menambah khasanah literatur mengenai implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami

b. Manfaat praktis

Bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten OKU, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet khususnya untuk burung walet habitat alami.

1.6. Keaslian Penelitian

Pemanfaatan sarang burung walet telah dilakukan selama beberapa dekade, akan tetapi penelitian ilmiah mengenai walet sendiri masih sangat sedikit. Akibatnya data mengenai walet ini sangat terbatas. Akhir-akhir ini penelitian mengenai walet lebih cenderung pada budidaya walet rumahan, sedangkan walet habitat alami yang banyak bersarang pada gua-gua kapur masih terbatas.

Hasil informasi dan penelaahan penulis dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota telah menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan burung walet, termasuk walet pada habitat alami. Namun sejauh ini belum ada evaluasi atau kajian mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan burung walet habitat alami dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian-penelitian yang mengkaji/berkaitan dengan burung walet habitat alami

Nama dan tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
Priyanto (2001)	Penyebaran Sarang, Teknik Pemanenan dan Sistem Pengelolaan Walet Sarang Hitam (<i>Collocalia maxima</i>) di Taman Nasional Kerinci Seblat Rayon Bengkulu Utara (skripsi)	Mengetahui penyebaran sarang walet dan habitatnya, teknik pemanenan dan sistem manajemen walet alam	<ul style="list-style-type: none"> - Semua walet dalam menempatkan sarangnya menempati mintakat Gelap Suhu Konstan (GSK) dengan permukaan dinding kering. - Pemanenan secara tradisional dilakukan tiap tiga bulan sekali - Pengelolaan dilakukan oleh investor
Mardiastuti & T. Sholihin (1999)	Pemilihan habitat Bersarang pada walet sarang Hitam dan walet Sarang Putih di Gua Empat Saudara, Kabupaten Berau , Kalimantan Timur (jurnal)	Menyingkap kondisi habitat peletakan sarang walet , baik walet sarang hitam maupun walet sarang putih	Faktor terpenting yang mempengaruhi dalam penggunaan tempat bersarang, baik walet sarang hitam maupun walet sarang putih ialah sifat mintakat dan substrat dinding atau atap gua
Wahyono (2005)	Keberadaan Hak Adat dalam Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alami : Antara Harapan dan Kenyataan (jurnal)	Mengkaji seberapa jauh adat diakomodasi dalam berbagai regulasi pengelolaan sarang burung walet di habitat alami	<ul style="list-style-type: none"> - Pengabaian masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sarang burung walet akan mengurangi kontrol atau pengawasan terhadap pengambilan sarang burung walet - Kemiskinan penduduk mendorong melakukan tindakan merusak fungsi lingkungan seperti penggundulan hutan, yang berpengaruh pada dinamika populasi serangga terbang yang menjadi makanan utama burung walet

Penelitian-penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan adalah :

1. Studi Implementasi Kebijakan Pengadaan Garam Beryodium di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati (Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro oleh Mirandati, D.A., 2007). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian proses implementasi pengadaan garam beryodium di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam
2. Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang (Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara oleh Suryana, S.E.L., 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terhadap informan
3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (Penelitian dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 17 No. 1, Jan-Apr 2010, oleh Syahrudin). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah metode evaluasi bersifat kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan yang terkait dengan objek masalah yang dikaji, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman .